

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

4.1 Pengantar Bab

Pada bab sebelumnya (BAB III) temuan penelitian memaparkan secara deskriptif mengenai realitas kemitraan yang dialami oleh para petani tembakau di Desa Brabo, Kab. Grobogan. Data yang terkumpul menunjukkan adanya kesenjangan antara ekspektasi kesejahteraan yang ditawarkan oleh skema kemitraan dengan yang dialami oleh petani. Isu krusial seperti ketidakpastian harga, minimnya pendampingan petugas mitra, hingga risiko penolakan barang yang dikirim mengakumulasi kekecewaan mendalam. Fenomena ini menegaskan temuan bahwa kemitraan yang seharusnya menjadi payung perlindungan yang mengayomi dan membawa kesejahteraan, justru dimaknai sebagai sumber kerentanan yang mengancam keberlangsungan usaha tani mereka.

Bab ini tidak lagi berhenti pada tataran deskripsi fenomena tersebut, melainkan melangkah lebih jauh lagi membedah dan menganalisis struktur nalar yang melandasinya. Fokus pembahasan bergeser dari “apa yang terjadi” menjadi “mengapa resistensi menjadi pilihan rasional” dan “bagaimana resistensi dikonstruksikan melalui proses komunikasi”. Analisis mendalam diperlukan untuk memahami bagaimana akumulasi kekecewaan ini berubah menjadi sebuah perlawanan melawan industri besar yang memiliki kuasa lebih dominan.

Untuk mengonstruksi ulang kompleksitas fenomena ini, pembahasan ini akan menggunakan tiga kerangka teoretis utama. Pertama, *Theory of Planned Behavior* (TPB) digunakan sebagai pembedah dimensi psikologis individu, menelusuri hilangnya persepsi kontrol dan perubahan sikap membentuk niat melawan. Kedua, teori *Coordinated Management of Meaning* (CMM) digunakan untuk menganalisis bagaimana interaksi yang terjadi di ruang sosial mengoordinasikan makna dan menciptakan norma perlawanan kolektif. Ketiga konsep *Everyday Resistance* dari James C. Scott digunakan mengidentifikasi berbagai wujud tindakan resistensi dari

petani, membedakan antara strategi kepatuhan palsu yang tersembunyi dan penolakan terbuka.

Secara keseluruhan, bab ini mengajukan argumen utama bahwa resistensi yang dilakukan oleh petani tembakau Desa Brabo bukanlah sebuah pembangkangan kriminal atau pelanggaran kontrak semata. Sebaliknya, resistensi ini adalah bentuk strategi bertahan hidup yang rasional dan terukur dari para petani. Tindakan tersebut dilakukan petani untuk merebut kembali kontrol atas ekonomi rumah tangga mereka.

4.2 Rekonstruksi Makna: Pergeseran Cara Pandang Terhadap Kemitraan

Resistensi yang muncul dari kalangan petani yang hendak menentang bagian dari sebuah industri besar tentunya bukanlah sesuatu yang secara tiba-tiba terjadi. Munculnya niat tersebut tentu didasari oleh beberapa faktor yang kuat, seperti proses kognitif yang kompleks, tekanan-tekanan sehingga mematikan langkah petani, serta interaksi sosial yang dinamis. Bagian dari bab ini akan membedah proses terbentuknya niat dari petani untuk melakukan perlawanan terhadap industri besar dengan menggunakan pisau analisis *Theory of Planned Behavior* (TPB). Sebagaimana dijelaskan dalam literatur terbaru mengenai perilaku petani.

Menurut teori ini, perilaku manusia dipandu oleh tiga jenis pertimbangan: yang pertama adalah keyakinan atas konsekuensi yang mungkin terjadi (*attitude*), yang kedua adalah keyakinan tentang ekspektasi atau harapan normatif dari orang lain (*subjective norms*) dan yang ketiga adalah keyakinan akan adanya faktor-faktor yang dapat memberikan fasilitas atau menghambat kerja (*behavioral control*) (Mbae Njoroge & O'Donoghue, 2025).

Untuk mengurai benang kusut tentang niat tersebut, analisis pertama haruslah menyentuh aspek yang paling mendasar, yaitu tentang bagaimana petani memaknai ulang posisi mereka dalam kemitraan. Apakah kemitraan ini masih dianggap sesuatu yang menguntungkan atau justru telah berubah menjadi ancaman kerugian?

4.2.1. Dari Mitra Menjadi Ancaman: Sikap Negatif terhadap Ketidakpastian

Pada awalnya, saat pertama kali informasi terkait kemitraan tembakau diberikan, para petani Desa Brabo menyambutnya dengan penuh harapan, berkat terdorong oleh ekspektasi kesejahteraan yang dijanjikan, serta citra bonafide perusahaan rokok ternama di Indonesia, yakni PT Djarum. Namun, setelah para petani menjalani skema kemitraan, yang awalnya dianggap akan mendatangkan kesejahteraan, mengalami pergeseran sikap (*attitude shift*) yang signifikan oleh para petani. Kemitraan yang pada awalnya diharapkan sebagai jembatan menuju kesejahteraan, kini justru dimaknai ulang dengan dianggap sebagai sumber ancaman ekonomi.

Berdasarkan temuan lapangan, motivasi awal dari para petani untuk bergabung dalam program kemitraan ini didasari oleh rasa yakin untuk mendapatkan harga yang tinggi, dan jaminan pasar yang lebih baik dibandingkan dengan jalur konvensional. Namun, keyakinan positif itu serta merta runtuh setelah para petani dihadapkan dengan fakta bahwa harga pembelian yang diterapkan oleh kemitraan bersifat fluktuatif dengan mengikuti harga beli pasar, bahkan berdasarkan temuan lainnya mengungkapkan bahwa terkadang harganya bisa lebih rendah dari harga tengkulak desa.

Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior* (TPB), fenomena pergeseran sikap ini menunjukkan perubahan drastis yang terjadi pada *Attitude Toward Behavior* (Sikap terhadap Perilaku) yang dimiliki oleh petani. Dalam sebuah tinjauan teoritis yang diuraikan oleh Beresford & Sloper (2008), dijelaskan bahwa sikap (*attitude*) seseorang terhadap sebuah perilaku, sangat ditentukan oleh keyakinan mereka mengenai konsekuensi apa yang akan timbul dari adanya perilaku tersebut (*beliefs about outcomes*). Ketika keyakinan petani akan mitra yang awalnya menguntungkan, kemudian terpatahkan oleh realitas harga yang tidak pasti, maka secara otomatis sikap mereka akan bergeser dari yang awalnya suportif menjadi resisten sebagai respon dari konsekuensi negatif yang mereka terima.

Kekecewaan yang dialami petani tidak berhenti pada aspek perasaan saja, namun berkembang menjadi poin pertimbangan apakah program kemitraan ini masih bermanfaat atau tidak. Petani mulai membandingkan usaha yang mereka

keluarkan dengan hasil yang didapat. Sebagaimana diungkapkan oleh informan yang merasa “malas” (enggan) untuk mengikuti alur program kemitraan karena harga yang tidak dikunci sejak awal, dan justru mengikuti tren harga pasar yang cenderung fluktuatif. Mengacu pada studi dari Mbae Njoroge & O'Donoghue (2025) intensi petani untuk mempertahankan suatu praktik pertanian sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap manfaat ekonomi yang dirasakan. Ketika kemitraan dimaknai sebagai suatu wadah yang tidak lagi memberikan keunggulan komparatif atau manfaat relatif dibandingkan dengan pasar bebas, akan mengakibatkan lemahnya kepatuhan pada kontrak, dan sikap negatif yang muncul adalah bentuk dari rasionalitas atas hilangnya manfaat tersebut.

Sikap resistensi yang muncul dari kalangan petani bukanlah sebuah bentuk dari pembangkangan, melainkan manifestasi dari hitung-hitungan perekonomian usaha tani mereka demi menyelamatkan modal. Dari data temuan lapangan, saat menjalankan usaha taninya, petani melakukan kalkulasi mendetail mengenai biaya-biaya yang harus mereka tanggung, mulai dari biaya tenaga kerja pemetikan dan perajangan tembakau yang menghabiskan banyak biaya sekitar Rp10.000,- untuk setiap kilogramnya. Kemudian jika seorang petani mengikuti program kemitraan PT Djarum yang mengharuskan mereka untuk mengemas ulang (pengebalan) tembakau mereka menggunakan kain blacu yang disediakan oleh pabrik, ditambah transportasi ekspedisi untuk mengirimkan tembakau mereka dengan biaya mencapai Rp50.000,- per bal. Keluhan mengenai tingginya biaya ini diungkapkan secara eksplisit oleh Informan I:

"Lha nak wingi kan mboten enten kepastian rega, mengikuti pasar. Dadi kan petani agak mamang. ... Lha, nak nggo mlebu. Lha nak mental kan proses e lumayan. Ngebal e tok wis ketok 50 ewu, 40 ribu sampe 50 ewu kan Mas. Dadi kan marake males petani ki." (Wawancara: Informan I, 2025)

Ungkapan “marake males” (membuat enggan) yang disampaikan oleh Informan I, bukan sekedar kemalasan secara fisik, melainkan respon emosional atas tingginya biaya ngebal (pengemasan) yang mencapai 50ribu rupiah. Tambahan biaya untuk pengemasan berpotensi akan memperkecil margin keuntungan yang seharusnya dimiliki oleh petani, berbanding terbalik dengan penjualan ke tengkulak bebas yang tidak perlu melakukan pengemasan ulang, dengan proses penjualan instan dan tidak

merepotkan petani. Dalam konteks ini, sikap “males” adalah respon rasional terhadap evaluasi hasil yang dinilai tidak sepadan (*undervalued*).

Beresford & Sloper (2008) menjelaskan bahwa penilaian seseorang terhadap hasil dari sebuah tindakan (*evaluation of outcomes*) adalah penentu dari munculnya *Attitude Towards Behavior*. Apakah hasil dari apa yang sudah diusahakan petani tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh petani. Petani menggunakan logika ini untuk menilai kepatuhan terhadap prosedur kemitraan yang kompleks tidak sebanding dengan tingginya biaya yang dikeluarkan, apalagi ditambah dengan ketidakpastian untung yang diberikan oleh perusahaan.

Puncak dari sikap negatif petani muncul ketika harus dihadapkan pada risiko penolakan barang saat proses penjualan. Ketakutan terbesar dari para petani mitra adalah risiko membawa pulang kembali tembakau yang sudah dikirimkan ke pabrik, selain karena rasa malu, barang hasil dari penolakan pabrik pasti akan dibeli murah oleh pasar, hingga kemudian muncul istilah “ajur mumur” (hancur lebur) bagi kemitraan ini dari para petani. Hal ini diungkapkan oleh Informan III dalam wawancaranya:

“Resikonya kalau disana itu kok pihak Djarum tidak membeli, dikembalikan, itu juga kan juga rugi, Mas. Adapun disana itu kan juga ditawarkan tapi dengan harga murah. Bahasane ajur mumur, Mas..... Mau tidak mau nah entuk semene, daripada kowe gowo muleh. Itu kita sudah kalah, Mas”

Ungkapan “ajur mumur” dan “sudah kalah” ini menunjukkan bahwa proses jual beli hasil panen dari petani kepada mitra, bukan membawa kesejahteraan melainkan sebuah kehancuran nilai, jika dilihat dari posisi tawar dan sistem penolakan barangnya

Beresford & Sloper (2008) menegaskan bahwa individu cenderung menghindari pelaku yang diasosiasikan dengan konsekuensi yang tidak diinginkan (merugikan). Sikap negatif dari para petani ini menjadi acuan petani untuk mencari opsi pasar yang lebih aman.

Namun, pemaknaan negatif dan persepsi kerugian ekonomi ini belum cukup menjelaskan keputusan petani dalam kemitraan. Rasa kecewa tersebut semakin terasa pahit saat berbenturan dengan realitas struktural, di mana petani tidak

memiliki kuasa memperbaiki keadaan sebagaimana akan diuraikan dalam analisis kontrol perilaku berikut.

4.2.2. Persepsi Penelantaran sebagai Pelanggaran Kontrak Moral

Ketidakpastian mekanisme kemitraan, khususnya ketiadaan kontrak sosial yang mengikat secara fundamental telah meruntuhkan keyakinan petani atas kemampuan mereka mengendalikan nasib usaha taninya sendiri. Kondisi ini menciptakan defisit kontrol perilaku, di mana petani tidak merasa berdaya menghadapi struktur yang tidak transparan.

Petani tidak memiliki kontrol atas situasi, di mana perusahaan mitra tidak memberikan kepastian harga hasil panen. Hal ini dikarenakan tidak adanya kesepakatan atau perjanjian awal menurut petani mengenai harga hasil panen antara petani dan perusahaan mitra. Ketiadaan perjanjian harga di awal ini menyebabkan posisi tawar petani yang lemah. Dalam kacamata *Theory of Planned Behavior*, situasi ini menciptakan hambatan eksternal yang kuat. Adapun menurut Roma et al., (2024) kesesuaian perjanjian dengan kondisi lapangan sangat memengaruhi keberlanjutan kerja sama kemitraan. Ketika fondasi ini absen, petani mengalami disorientasi, mereka tidak tahu standar apa yang harus dipenuhi.

Wujud nyata dari adanya asimetris informasi adalah adanya keinginan petani untuk memperoleh harga hasil panen yang tinggi dalam mengikuti program kemitraan sedangkan perusahaan memiliki hak untuk menentukan harga hasil panen petani secara sepihak, tanpa adanya kesepakatan harga di awal. Hal ini jelas akan memicu resistensi petani terutama karena perasaan kecewa apabila harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan ekspektasi petani. Dengan demikian, petani tidak memiliki kontrol untuk meminta harga hasil panen yang lebih tinggi atau standar karena sejak awal tidak ada perjanjian mengenai hal tersebut. Seperti ungkapan yang disampaikan oleh Informan III dalam wawancaranya:

“Saya kirim... saya kirim. Itu ada untung, tapi yang selanjutnya kan kita juga sudah rugi karena memang kebetulan di sana harganya mulai menurun menurun seperti itu padahal saat kurang saya juga bisa belikan milik tetangga masih harga dengan tinggi. Itu memang kita rugi lah, sekitar 1 juta nan.....’kalau sistemnya seperti ini Mas, Kita rugi, Mas tapi. Lha

tapi gimana, Mas?’ ‘Lha gimana pak, ini keputusan dari Djarum’ ‘Oh iya, sudah’”

Keputusan Informan III untuk mencoba mengirimkan hasil panennya ke mitra dengan total kerugian 1 juta rupiah, menjadi bukti empiris bahwa dalam sistem ini, suara petani tidak memiliki daya ungkit. Negosiasi yang buntu tersebut memperkuat keyakinan bahwa control eksternal (Keputusan Perusahaan) jauh lebih dominan daripada usaha individu petani.

Menurut studi (Beresford & Sloper, 2008) menyatakan bahwa persepsi kontrol perilaku (*control beliefs*) seseorang mencerminkan keyakinan tentang faktor-faktor yang dapat menghambat atau mempromosikan pelaksanaan perilaku tersebut. Asimetris informasi ini akan menggerus *control beliefs* dan menguatkan keyakinan petani bahwa mereka tidak punya kuasa apa-apa di sini

Jika harga ditentukan pihak mitra dan petani tidak boleh mengajukan penawaran yang berarti tidak punya kontrol sama sekali, tentunya petani meyakini bahwa perilaku tersebut akan menjadi penghambat kuat, kemudian menganggap kemitraan sudah bukan rekanan yang bisa diajak kerja sama lagi. Karena merasa didikte dan tidak punya kuasa untuk menentukan bagaimana nasib hasil pertanian mereka, motivasi mereka untuk patuh ke dalam sistem kemitraan menjadi hilang.

Perasaan hilangnya kendali ini disuarakan dengan kuat oleh petani, dengan melabeli sistem kemitraan ini sebagai sistem kemitraan yang “cul-culan” atau “jar-jaran” yang artinya ditelantarkan atau dilepas begitu saja, tanpa adanya pendampingan. Istilah ini merepresentasikan hilangnya peran mitra sebagai pendamping (*facilitating condition*) yang seharusnya hadir memberikan kepastian teknis. Sebagaimana dikeluhkan oleh Informan VI bahwa ketidakhadiran petugas mitra membuat para petani merasa berjuang sendiri.

“Semenjak misale niki ajeng kula ndeder, ajeng kula nanem kok meneng-meneng mawon mboten enten kesimpulan mandhap mriki antaran petugas saking Djarum. Lah niku rak nggih kula re ya pun terus kula culke. Lah, sing ajeng kula nut sinten wong sing mriki mboten enten sing ngurusi... Lah, kula nggih nggih sak karepe kula dhewe (tertawa)”

Ungkapan dari Informan VI tersebut menyimpan rasa kekecewaan mendalam yang melampaui masalah teknis. Metafora “anak ora diurusi” menegaskan bahwa petani

memaknai kemitraan bukan hanya sekedar bisnis, tetapi relasi bapak dan anak yang kini telah retak karena sang bapak (perusahaan) abai. Absennya *facilitating condition* ini membuat petani kehilangan pegangan.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh peneliti melalui wawancara langsung, di mana terlihat nadanya meninggi, dan matanya berkaca-kaca, seakan-akan sedang menyuarakan keterlantaran. Rasa kekecewaan Informan VI disampaikan dalam bentuk metafora yang juga mudah peneliti pahami, Informan VI mengibaratkan dirinya seperti anak yang tidak diurus oleh orangtuanya.

“Nggih, misale contone duwe anak ora diurusi kan gampangane kasarane ngoten to mas”

Ungkapan tersebut menyimpulkan bahwa sudah ada pemaknaan atas sistem kemitraan yang sudah mendalam, atas hilangnya mitra sebagai sosok pendamping tersebut.

Beresford & Sloper (2008) menjelaskan bahwa pembentukan persepsi kontrol perilaku (*Perceived Behavioral Control*) terdiri dari dua faktor internal dan eksternal. Dalam memproduksi hasil panen yang sesuai dengan kriteria perusahaan, petani perlu bergantung dengan petugas mitra untuk meminta arahan dan masukan, namun ketidakhadiran ini membuat petani tidak bisa memenuhi *perceived behavioral control* yang seharusnya dia miliki. Ketika pendampingan ditiadakan, maka petani berasumsi bahwa keberhasilan mitra akan sulit tercapai, sehingga opsi untuk keluar dari sistem menjadi pilihan yang masuk akal.

Dalam situasi di mana kontrol internal mereka terbelenggu oleh aturan sepihak dari perusahaan, opsi untuk menjual ke pasar bebas (tengkulak) dimaknai sebagai langkah yang rasional untuk merebut kembali apa yang disebut dengan *reclaiming control* atau kedaulatan atas aset ekonomi mereka. Berbeda dengan sistem kemitraan, penjualan tembakau ke tengkulak memiliki kepuasan tersendiri bagi petani, di mana barang ditimbang di depan mata, petani bisa langsung melakukan negosiasi dengan tengkulak, kemudian minim adanya risiko penolakan.

Tindakan menjual keluar ini dilakukan bukan sekedar untuk mencari untung lebih, namun juga sebuah upaya dari petani untuk memulihkan *locus of control* mereka yang telah hilang. Resistensi menjadikan para petani untuk menjadi tuan

atas hasil keringat mereka sendiri, dan membebaskan diri dari posisi subordinat yang diciptakan oleh mekanisme kemitraan yang timpang.

Pada titik ini, kombinasi antara pemaknaan negatif (rasa rugi dan ketidakpastian) dan hilangnya persepsi kontrol (rasa tidak berdaya) telah membentuk benih niat untuk resistensi dalam batin individu. Namun keresahan yang dirasakan membutuhkan validasi eksternal agar berani dieksekusi menjadi tindakan nyata. Bagaimana keresahan individu ini akan dibawa ke ruang sosial, hingga kemudian disepakati bersama akan dibahas dalam sub-bab berikut.

4.3 Dinamika Komunikasi Antar-Petani dan Pembentukan Kesepakatan Kolektif

Dalam memahami fenomena resistensi di Desa Brabo, aspek ekonomi dan komunikasi merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan, namun memiliki peran fungsional yang berbeda. Peneliti menyadari bahwa motif fundamental yang mendorong keresahan petani merupakan akibat dari ketidakpastian harga dan risiko penolakan hasil panen. Namun, tekanan ekonomi semata hanya akan melahirkan keresahan individual yang terpendam jika tidak ada saluran komunikasi yang memvalidasinya. Tanpa adanya interaksi sosial, kalkulasi untung rugi hanya akan sampai pada keluhan batin dalam ruang kognitif petani masing-masing.

Di sini dinamika komunikasi antar pribadi berfungsi sebagai katalisator utama. Niat resistensi yang semula hanya dipendam sendiri dalam ruang kognitif petani, selanjutnya tidak mengendap begitu saja. Sebagai makhluk sosial yang tentunya butuh berbagi cerita dan informasi menjadikan niat resistensi tersebut bertransformasi menjadi fenomena sosial melalui interaksi sosial yang intens. Komunikasi antarpribadi dalam hal ini berfungsi sebagai katalisator utama yang mengubah keresahan personal menjadi kesadaran kolektif. Berdasarkan temuan di lapangan, para petani melakukan “rembugan” atau diskusi informal di ruang sosial, misal teras rumah, atau gardu sawah (tempat petani beristirahat saat bekerja).

Fenomena ini sejalan dengan perspektif *Coordinated Management of Meaning* (CMM) yang dijelaskan oleh Littlejohn et al. (2017) di mana komunikasi bukan sekedar alat penyampai pesan, melainkan proses konstitutif yang

menciptakan realitas sosial (*creating social world*). Melalui koordinasi tindakan dalam percakapan sehari-hari, para petani menyelaraskan makna mereka tentang situasi kemitraan yang tidak beres, sehingga terbentuklah realitas sosial baru di tingkat komunitas, bahwa perlawanan adalah langkah yang diperlukan.

Melalui pertukaran informasi tersebut, terjadi proses validasi sosial di mana persepsi negatif individu dikonfirmasi oleh pengalaman serupa dari rekan sejawat. Sebagaimana temuan mengenai adanya validasi keluarga dan observasi rekan senasib, dalam irisan dengan *Theory of Planned behavior* interaksi tersebut membentuk *Subjective Norms* (Norma Subjektif) yang kuat. Dalam kajian (Mbae Njoroge & O'Donoghue, 2025) mendefinisikan norma subjektif mengacu pada tekanan sosial atau eksternal dari "referensi utama" (orang-orang penting) untuk melakukan atau menahan diri dari suatu perilaku. Ketika figur penting seperti keluarga atau rekan sesama petani memberi sinyal persetujuan untuk menjual keluar, maka norma kepatuhan akan tergeser menjadi norma perlawanan.

4.3.1. Diskusi Kelompok sebagai Ruang Koordinasi Makna

Aktivitas “rembugan” atau diskusi informal yang intensif dilakukan menjelang panen tidak dapat dipandang hanya sebagai pertukaran informasi semata, hal tersebut adalah mekanisme fundamental dalam pembentukan realitas sosial perlawanan. Namun proses ini terjadi secara frontal atau tidak melalui sebuah rapat formal. Berdasarkan temuan lapangan, pembentukan resistensi kolektif ini bermula dari “komunikasi sunyi” atau berawal dari pengamatan petani terhadap lingkungannya.

Informan V mengungkapkan keputusan untuk tidak menyetorkan hasil panennya ke mitra sering kali diawali dengan mengamati aktivitas tetangga. Informan V tidak melihat adanya aktivitas pengemasan (madahi) di rumah tetangga, yang menjadi sebuah pesan non-verbal kuat bahwa terjadi mogok kirim secara massal.

“Ajakane ya. Alah mitra anu ora kancane do madahi ngepresi mbako aku wis tak dol njobo wae ngono (tertawa)”

Frasa “ora kancane do madahi” (tidak ada teman yang mengemasi tembakaunya) adalah sebuah sinyal awal. Petani yang awalnya ragu sendirian, mendapatkan validasi visual dari sekitar, bahwa tetangganya pun tidak melakukan persiapan menyotorkan tembakaunya kepada mitra. Dari pengamatan visual ini, komunikasi berlanjut ke tahap verbal untuk memastikan posisi masing-masing.

Informan IV dalam wawancaranya menjelaskan bahwa dalam menumbuhkan rasa aman dalam dirinya, ia melakukan upaya “cek ombak” untuk mencari kawan senasib. Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti “kamu sudah setor belum?” yang ia lontarkan kepada rekan sejawatnya sebenarnya berfungsi untuk mengukur seberapa banyak rekan yang mengambil langkah resistensi sehingga mengurangi risiko jika harus menanggung beban sanksi sendirian.

“Nggih maksude nggih tanglet ten ten kepethuk bolo-bolo tani sing nderek niku ta niku ta. “Kowe wis setor ndurung?” “Durung.” “Wis setor ndurung?” “Durung.” Nah, ternyata sing ditakoki niku sing setor kalih sing mboten setor niku kathah sing mboten setor.”

Dalam titik ini, meskipun terkesan sunyi dan tidak provokatif, langkah yang dilakukan oleh Informan IV ini secara tidak langsung telah membentuk sebuah proses pengumpulan persepsi, yang berlanjut menjadi sebuah pengumpulan kekuatan (*gathering power*). Jawaban “durung” (belum) yang dilontarkan oleh mayoritas petani bukan sekedar informasi status, melainkan sebuah konfirmasi solidaritas. Petani merasa aman karena menyadari bahwa mereka berada dalam barisan mayoritas yang membangkang (“*kathah sing mboten setor*”), sehingga posisi pasif bermitra yang awalnya merupakan sebuah ketakutan individu, akhirnya melebur menjadi sebuah keberanian kolektif.

Setelah rasa aman terbentuk karena banyak rekan sejawat yang melakukan hal sama, barulah muncul sebuah keberanian menumpahkan kekecewaan secara terbuka. Hal ini diungkapkan oleh Informan III, di mana diskusi berkembang menjadi ajang pelepasan beban emosional (*catharsis*) atas ketidakcocokan sistem bermitra.

“ Woiyaa. ke temen. Podo tanya, ‘piye kirim rono piye?’ ‘Walah kirim ra mathuk’ aku yo ngono. ‘Ra mathuk wong ndek kono kirime podo koyok tengkulak kok’, yo ngono, Mas.”

Ketika petani lain bertanya kepada Informan III tentang pengalamannya mengirimkan hasil panennya kepada kemitrran (“piye kirim rono piye”), Informan III menjawab “*ra mathuk*” (tidak cocok) yang mengindikasikan bahwa pengiriman tembakau ke mitra sudah tidak bisa menjadi sandaran utama sebagai muara penjualan hasil panen. Hal ini menegaskan bahwa terjadi penyelarasan tindakan tentang “Saya coba kirim tidak cocok, Kamu tidak usah kirim”.

Dalam perspektif *Coordinated Management of Meaning* (CMM), fenomena ini disebut sebagai proses *Coordination* (Koordinasi) sebagaimana dijelaskan dalam Griffin et al., (2018) Koordinasi adalah proses di mana orang-orang berkolaborasi dalam upaya untuk mewujudkan visi mereka tentang apa yang diperlukan, mulia, dan baik, serta menjauhi apa yang mereka takuti, benci, atau anggap jahat. Griffin menekankan bahwa koordinasi adalah soal menyelaraskan tindakan, bukan berarti harus sepakat soal makna. Melalui koordinasi ini, keluhan yang semula personal, terbangun menjadi sebuah kesepakatan bersama bahwa kemitraan tidak berpihak pada mereka.

Proses koordinasi menjadi titik balik yang krusial, karena akan mengubah definisi situasi di tingkat komunitas. Ketika seorang petani bertanya pada rekannya, “kowe wis setor durung?” dan dijawab dengan jawaban yang tidak bersemangat, akan menimbulkan keselarasan makna diantara mereka. (Littlejohn et al., 2017) menjelaskan bahwa komunikasi bukan sekedar alat untuk menyampaikan pesan, melainkan proses konstitutif, yang dalam konteks Desa Brabo, para petani tidak hanya bertukar data, tetapi sedang mengonstruksi realitas sosial baru, sebuah realitas di mana ketidakpatuhan menjadi hal yang lumrah. Di mana perusahaan tak lagi dimaknai sebagai patron yang harus dipatuhi, melainkan pihak asing yang perlu diwaspadai.

Selain koordinasi, interaksi yang dilakukan petani ini juga membantu menciptakan Koherensi dalam kelompok. Griffin et al., (2018) menjelaskan bahwa Koherensi adalah proses memaknai cerita yang kita ceritakan (*making sense of stories told*). Ini adalah bagaimana kita menafsirkan peristiwa yang terjadi agar sesuai dengan narasi hidup kita.

Temuan menunjukkan bahwa selama diskusi, para petani seringkali menyandingkan kondisi kemitraan saat ini dengan pengalaman masa lalu, atau bahkan dengan kemitraan lain yang dianggap lebih ideal seperti misalnya “mending di sana, ada modal.” “di mitra sebelah dibimbing sampai panen”. Dalam teori CMM, Koherensi adalah cara anggota menginterpretasikan dan memahami percakapan dengan menempatkannya dalam cerita yang lebih besar (*stories told*). Secara kolektif, para petani membangun narasi bahwa ketidakadilan yang mereka alami bukan karena kesalahan mereka, tetapi ada cacat dalam struktural sistem “*Mitrane medeni*”. Pembangunan narasi koheren ini berfungsi untuk memberikan legitimasi moral yang akan membuat tindakan resistensi terlihat masuk akal.

Melalui koordinasi berjenjang ini, keresahan yang semula terpendam di kepala masing-masing petani terajut menjadi sebuah kesepakatan baru bahwa aksi yang mereka lakukan adalah sebuah rangkai rasional yang didukung oleh komunitas. Tindakan “tidak setor” yang secara formal dan kontrak dikategorikan sebagai pelanggaran komitmen (wanprestasi) mengalami rekonstruksi makna. Petani tidak lagi melihatnya sebagai kegagalan moral atau tindakan yang memalukan, melainkan divalidasi sebagai mekanisme pertahanan diri (*survival mechanism*) yang rasional dan sah secara sosial.

4.3.2. Pengaruh Lingkungan Sosial dan Validasi Tindakan

Selain bentuk kesepakatan di ruang publik, keputusan individu untuk melakukan resistensi juga dipengaruhi oleh tekanan sosial dari lingkungan terdekat, terutama keluarga. Berdasarkan temuan penelitian, dukungan dan desakan istri atau keluarga menjadi validasi krusial bagi petani untuk memutus jalur distribusi ke perusahaan. Istri yang berorientasi pada pemenuhan gizi dapur, akan mendesak suami untuk memilih opsi penjualan yang segera menghasilkan uang (sing penting payu), perputaran uang dalam jangka dekat akan lebih memungkinkan untuk dapur mereka tetap berasap. Dalam *kerangka Theory of Planned Behavior*, Mbae Njoroge & O'Donoghue, (2025) menjelaskan fenomena ini merefleksikan kuatnya Norma Subjektif (*Subjective Norms*) yaitu tekanan sosial yang dirasakan oleh individu dari orang-orang penting (seperti istri atau keluarga) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jika figur otoritas keluarga memberikan sinyal untuk segera

menjual keluar demi alasan ekonomi keluarga, tekanan sosial ini akan menggeser pemaknaan “pelanggaran kepatuhan kontrak” menjadi “menjaga kesejahteraan keluarga”, yang secara psikologis mempermudah pengambilan keputusan resistensi. Dorongan untuk melawan menjadi semakin tak terbendung ketika *Subjective Norms* (konsep asal *Theory of Planned Behavior*) bertemu dengan kekuatan logis (*Logical Force*) yang merupakan konsep dari *Coordinated Management of Meaning* (CMM). Seperti yang disampaikan oleh Informan V dalam wawancaranya:

“Nggih maksude nggih tanglet ten kepethuk bolo-bolo tani sing nderek niku ta niku ta. 'Kowe wis setor ndurung?' 'Durung.' 'Wis setor ndurung?' 'Durung.' Nah, ternyata sing ditakoki niku sing setor kalih sing mboten setor niku kathah sing mboten setor.”

Dialog tersebut bukan sekedar pertukaran kabar, melainkan mekanisme validasi sosial. Mengetahui mayoritas rekan “belum setor” memberikan suatu pembenaran eksternal, dan membuat kesimpulan bahwa ada satu kesepakatan yang terbentuk, yaitu “tidak setor”

Setelah melalui diskusi-diskusi informal yang dilakukan oleh para petani di teras-teras rumah atau gardu sawah, yang akhirnya mendatangkan proses koordinasi yang kuat, selanjutnya petani merasa memiliki “kewajiban moral” untuk bertindak sesuai dengan apa yang sudah disetujui oleh kesepakatan kelompoknya. (Griffin et al., 2018) menjelaskan bahwa *logical force* adalah rasa keharusan moral (*sense of obligation*) untuk merespon situasi sesuai dengan cerita atau narasi yang dibangun bersama.

Hasil diskusi dan penalaran bersama yang telah dilakukan kelompok petani menghasilkan terbangunnya narasi dan citra buruk dari kemitraan, dan menyimpulkan bahwa “kemitraan tidak adil”, “kemitraan semaunya sendiri”, dan “kemitraan tidak mengayomi petani”, yang menciptakan kekuatan logis (*logical force*) sebuah keharusan moral bahwa setia pada sesama petani (solidaritas) lebih mulia daripada setia kepada perusahaan. Dengan ini petani akan lebih merasa lebih kuat prinsipnya untuk melakukan resistensi, resistensi bukan sekedar pemikiran impulsif, melainkan sebuah mufakat yang lahir dari musyawarah bersama.

4.4 Manifestasi Strategi Resistensi Petani dalam Ranah Praktis

Berdasarkan analisis pemaknaan dan dinamika komunikasi yang sudah dibahas sebelumnya, resistensi petani Desa Brabo tidak hanya berhenti di niat atau wacana semata. Namun juga direalisasikan lewat perlawanan yang terkoordinasi, yang kemudian bermanifestasi terhadap tindakan taktis di lapangan. Mengacu pada kerangka konseptual yang dikenalkan oleh Vinthagen & Johansson (2013) yaitu Everyday Resistance Theory menjelaskan bahwa resistensi praktis dijelaskan melalui empat dimensi utama yang saling berkaitan: 1) repertoar tindakan/Kumpulan kebiasaan (*repertoires*) 2) agen yang terlibat (*agents*) 3) konteks relasi kuasa (*context*), dan 4) intensionalitas (*intentionally*).

Temuan penelitian menjelaskan secara rinci tentang pemicu resistensi yang berawal dari intensitas individual dari petani yang kemudian dimasak ke dalam diskusi kolektif akhirnya memunculkan tindakan perlawanan. Bentuk-bentuk atau wujud resistensi petani secara lengkap dijelaskan meliputi (1) aksi menjual hasil panen kepada pihak luar (non-mitra), (2) bersikap pasif atau menghindari komunikasi dengan pihak perusahaan mitra, serta (3) penolakan terbuka dimana petani secara terang-terangan berani menyatakan protes secara langsung, hingga (4) melakukan setor parsial/ terukur dimana petani tetap mengirimkan hasil panen miliknya namun hanya sebagian. Macam-macam bentuk tindakan perlawanan atau repertoar resistensi ini terpolarisasi dalam dua spektrum utama: strategi bertahan yang tersembunyi (*hidden transcript*) dan perlawanan yang memecah transkrip publik (*public transcript*) sesuai dengan teori dari James C. Scott.

Pilihan strategi ini sangat dipengaruhi oleh dimensi konteks dan intensionalitas. Dalam konteks ketimpangan relasi kuasa di mana petani tidak memiliki kontrak harga tetap sehingga memiliki posisi tawar yang lemah, cenderung menggunakan *hidden transcript* sebagai siasat aman, tapi ketika intensionalitas untuk menghindari rugi semakin kuat, resistensi akan bereskalasi menjadi perlawanan terbuka, tanpa takut terhadap sanksi. Tindakan ini secara sadar dilakukan oleh petani dalam upaya merebut kembali kontrol (*reclaiming control*) atas kesejahteraan mereka yang terganggu.

4.4.1. Politik Kepatuhan Palsu (*False Compliance*) dan Siasat Mengulur Waktu

Dimensi pertama yang akan dibahas adalah repertoar tindakan (kumpulan kebiasaan petani), salah satunya adalah bentuk Politik Kepatuhan Palsu (*False Compliance*). Istilah ini muncul dari realitas lapangan di mana petani menampilkan wajah patuh secara administratif, dengan tetap mendaftar dan tidak menolak kemitraan secara frontal, namun melakukan pembangkangan taktis di belakang. Bentuk nyatanya adalah dengan melakukan setor parsial, dimana petani tetap mengirimkan hasil panen, namun hanya sebagian saja dari keseluruhan hasil panen yang dimilikinya.

Fenomena ini tergambar jelas dari pernyataan Informan III dalam wawancaranya, ia menjelaskan bahwa tindakan menyabang ini adalah mekanisme pertahanan hidup yang rasional agar tidak “mati konyol” akibat aturan kemitraan yang kaku:

“Yang saya setorkan ini sebagian. Sebagian lagi saya setorkan ke tengkulak. Karena begini, kalau saya jual semua dan pada akhirnya rugi. Orang juga tidak mau bunuh diri seperti itu.”

Secara teoritis, temuan “Politik Kepatuhan Palsu” ini sejajar dengan konsep Disimulasi (*Dissimulation*) yang dikemukakan oleh Scott, (1985) dalam “Weapons of The Weak”. Scott mendefinisikan disimulasi sebagai taktik kaum lemah untuk memalsukan kepatuhan di panggung depan (public transcript), Petani sebagai kelompok subordinat tidak berani melakukan perlawanan terbuka. Sebagai gantinya mereka menciptakan sebuah kepatuhan semu untuk menjaga keamanan dan hubungan patronase dengan perusahaan.

Namun, di balik kepatuhan tersebut, petani menjalankan Transkrip Tersembunyi mereka Di sinilah resistensi yang sesungguhnya terjadi, mereka menjual hasil panen ke tengkulak dan membiarkan sisa-sisa hasil panennya ke kemitraan, atau bahkan tidak menyetorkannya sama sekali. Sebuah strategi untuk menutupi pembangkangan ekonomi agar tidak terdeteksi ada perlawanan politik yang mencolok.

Dalam analisis dimensi Vinthagen, tindakan Informan III sangat dipengaruhi oleh posisi keagenan (*Dimension of Agents*). Sebagai tokoh panutan kalangan petani, posisi yang membatasi keputusan repertoarnya untuk tetap menjaga citranya dengan perusahaan. Oleh karena itu, ia memilih repertoar “setor parsial” sebagai jalan tengahnya. Secara sosial tetap patuh, namun secara ekonomi dia sedang menyelamatkan diri. Ungkapan tidak mau bunuh diri juga menegaskan dimensi intensionalitas (*dimension of intentionality*) bahwa repertoar dilakukan dalam kondisi kesadaran penuh dan kalkulasi matang untuk menyelamatkan ekonomi keluarga, bukan karena ketidaktahuan atau kesalahan teknis.

Selain kepatuhan palsu, repertoar lain yang akan dibahas adalah tentang strategi siasat mengulur waktu (*foot-dragging*) yang digunakan oleh Informan II, yang menggunakan alasan pribadi sebagai tameng taktis, untuk menghindari kewajiban penyuluhan.

“Mboten nate. Sama sekali. ... Soale saya orangnya super sibuk (ketawa) iya. Lha niku ngojek pupuk.”

Sikap pasif Informan II memanfaatkan Ambiguitas situasi dalam kerangka Vinthagen & Johansson (2013) resistensi dilakukan dengan cara membaur dalam rutinitas harian, di mana alasan sibuk kerja berfungsi sebagai topeng (*masking*) dilakukan untuk mengaburkan motif perlawanan yang sebenarnya. Dengan berlindung dibalik norma kepala keluarga yang mencari nafkah, Informan II berhasil menetralkan tuntutan mitra tanpa harus memicu konflik. Sebuah karakteristik khas dari resistensi kaum subordinat.

4.4.2. Penolakan Terbuka dan Pemutusan Ketergantungan

Ketika strategi tertutup dirasa tidak lagi memadai untuk membendung kerugian, resistensi petani berevolusi kepada penolakan terbuka dan upaya pemutusan hubungan. Dalam dimensi konteks (*context of resistance*) menurut Vinthagen, tindakan radikal ini muncul karena struktur kemitraan yang dinilai telah gagal dalam memberikan jaminan keamanan, konteksnya dalam kemitraan ini adalah tentang kepastian harga jual (*fixed price*) akibatnya petani melakukan pemutusan hubungan total dan menjualnya ke pihak luar (non-mitra)

Aksi menjual hasil panen kepada pihak luar (nonmitra) merupakan bentuk resistensi yang paling nyata dalam skema kemitraan ini. Sedangkan wujud resistensi berupa protes secara langsung kepada staf mitra, merupakan momen peralihan dimana *hidden transcript* (umpatan di belakang) berubah menjadi konfrontasi terbuka di panggung depan (*public transcript rupture*). Mengacu pada Zulfikar et al., (2021) resistensi terbuka merupakan suatu upaya perlawanan yang dilakukan terhadap pihak yang sewenang-wenang, dilakukan secara terang-terangan di depan yang dihadapinya secara langsung. Mencakup gagasan atau maksud-maksud yang meniadakan basis dominasi itu sendiri.

Fenomena ini juga dapat dilihat pada kasus Informan I serta mayoritas informan lain yang secara rasional memilih pasar bebas (tengkulak) yang untuk mengirimkan hasil panennya, dan tidak menyetorkan hasil panennya ke mitra sama sekali. Pilihan ini beralasan karena menurut petani sistem penjualan ke pihak luar lebih instan, di mana Tembakau ditimbang depan mata dan langsung dibayar, sedangkan perusahaan tidak. Terlebih barang-barang yang sudah dikirim ke pabrik, kemudian mendapat penolakan, Harga barang tersebut akan langsung turun drastis.

“Nah, petani kene kan daripada resiko ngko nak mental (ditolak), mending kan didol karo wong njobo luwih penak. Jebret. Timbang langsung bayar, ngoten.”

Ungkapan “jebret” yang diucapkan oleh Informan I merepresentasikan efisiensi total. Kata tersebut menyimbolkan kepastian dan sistem penjualan kepada pasar bebas (non-mitra), sekaligus menjadi kritik implisit terhadap birokrasi kemitraan yang lambat dan berisiko. Bagi petani, “jebret” adalah bunyi kemenangan ekonomi atas sistem yang kaku.

Selain itu, perlawanan ini juga terwujud dalam bentuk penolakan langsung terhadap mitra. Informan VI misalnya, cukup berani menolak mengirimkan hasil panennya.

“Lah terus wong Djarum kok ora ngurusi kula lah terus kula sing ajeng kula kirmi sinten? ... Njenengan pikir piyambak kok pripun? (tertawa)”

Respon tertawa dan pertanyaan retorik dari Informan VI di atas, sebenarnya bentuk delegitimasi otoritas. Dalam wacana Scott, tindakan semacam itu menunjukkan

runtuhnya hegemoni perusahaan di mata para petani. Para petani tidak lagi menganggap perusahaan sebagai patron yang harus ditakuti, tetapi sebagai mitra yang gagal dan layak ditinggalkan. Dengan menjual kepada perantara dan mengabaikan perintah dari pihak berwenang, para petani merebut kembali kedaulatan ekonomi mereka dan membebaskan diri dari apa yang mereka anggap sebagai sistem eksploitasi.

Keputusan yang dilakukan Informan VI menggambarkan tidak ada pilihan lain selain memutuskan ketergantungan dengan kemitraan, untuk mengobati kekecewaannya selama menjalin hubungan dengan mitra.

4.5 Diskusi: Dinamika Komunikasi dan Konstruksi Resistensi Petani (*Thematic Integration*)

Berdasarkan paparan tema-tema di atas, dinamika resistensi yang terjadi di kalangan petani Desa Brabo bukanlah serangkaian aksi impulsif yang berdiri sendiri, melainkan sebuah sistem respon terstruktur. Sejalan dengan prinsip *Reflexive Thematic Analysis* yang menekankan kaitan antar-tema (Braun & Clarke, 2006), temuan ini menunjukkan bahwa resistensi lahir dari akumulasi kekecewaan struktural yang kemudian diinternalisasi oleh petani sebagai ancaman keberlangsungan ekonomi rumah tangga. Resistensi, dalam tahap ini, dikonstruksi bukan sebagai pembangkangan kriminal, melainkan rasionalitas bertahan hidup.

Lebih jauh, analisis ini menegaskan bahwa “niat” yang dimiliki oleh masing-masing individu tidak serta merta menjadi aksi tanpa adanya media komunikasi. Ruang-ruang sosial informan seperti teras rumah atau pematang sawah berfungsi sebagai arena validasi, di mana keluhan pribadi dikoordinasikan menjadi kesepakatan kolektif. Proses ini membuktikan premis konstruktivis dalam *Basic Qualitative Research* (Merriam & Tisdell, 2016) bahwa makna perlawanan dikonstruksi melalui interaksi sosial, bukan ditemukan begitu saja. Melalui obrolan santai, petani membangun narasi bersama bahwa memanipulasi kontrak adalah tindakan yang sah secara moral dan keadilan ekonomi, yang kemudian memicu aksi dengan menjual keluar secara massal.

Secara holistik, dinamika ini menggugurkan asumsi bahwa petani dalam skema kemitraan adalah aktor pasif. Sebaliknya, mereka adalah agen aktif yang

mampu memanfaatkan celah komunikasi dan ambiguitas sistem untuk merebut kembali kendali. Temuan ini menggarisbawahi bahwa kemitraan Desa Brabo bukan semata-mata masalah teknis agronomi, melainkan kegagalan Perusahaan dalam memenangkan pertarungan makna di ruang komunikasi akar rumput.